

Strategi Gereja Katolik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang

Dr.Dra. Fitriyah, M.A*, Alfonsus Ega Putria Warsanto**

[*fitrivasemarang@yahoo.co.id](mailto:fitrivasemarang@yahoo.co.id)

**warsanto.alfonsusega@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial,

Universitas Diponegoro, Semarang

Website : fisip.undip.ac.id - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, termasuk dalam politik. Agama Islam, agama mayoritas di Indonesia, telah lama turut berpartisipasi dalam politik, baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun partai politik. Sementara itu, agama lainnya memiliki pandangan tersendiri mengenai politik, termasuk Agama Katolik. Gereja Katolik, sebagai lembaga Agama Katolik, telah mengeluarkan berbagai dokumen resmi mengenai politik, baik pada tingkat dunia maupun berbagai tingkatan dibawahnya, seperti di Keuskupan Agung Semarang. Berbagai dokumen tersebut menunjukkan Keuskupan Agung Semarang berupaya meningkatkan partisipasi politik umatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber, observasi, serta studi dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik. Teori hubungan agama dan negara, partisipasi politik, dan strategi digunakan untuk menganalisis temuan-temuan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan beberapa hambatan yaitu rendahnya pemahaman politik umat, perasaan sebagai minoritas, dan situasi politik yang tidak kondusif, karena munculnya kelompok-kelompok primordial yang memunculkan politik sektarian. Gereja Katolik memiliki strategi, terdiri dari strategi internal dan eksternal. Strategi internal, menysasar ke umat dan para imam bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pandangan, sikap, dan nilai Katolik dalam politik serta mempersiapkan umat masuk dalam kontestasi politik. Sementara itu, strategi eksternal dalam bentuk kerjasama dengan KPU, Bawaslu, Organisasi kemasyarakatan, dan Partai Politik, salah satu tujuannya menciptakan iklim politik kondusif bagi semua kelompok. Peneliti menemukan adanya faktor penghambat dari hirarkie gereja, di tingkat paroki, ketika ada awam yang memiliki oleh kepentingan politik pribadi sehingga strategi gereja tidak menjangkau semua umat, khususnya yang berkontestasi dalam Pemilu. Selain itu, strategi untuk mempersiapkan umat terjun dalam kontestasi dinilai terlalu singkat, hanya ketika menyambut tahun politik saja.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Strategi, Agama, Gereja Katolik, Keuskupan Agung Semarang

ABSTRACT

Religion has a great influence on social life, including in politics. Islam, the majority religion in Indonesia, has long participated in politics, both through social organizations and political parties. Meanwhile, other religions have their views about politics, including Catholicism. The Catholic Church, as an institution of the Catholic Religion, has issued various official documents on politics, both at the world level and at various levels below, such as the Archdiocese of Semarang. These documents show that the Archdiocese of Semarang is trying to increase the political participation of its people. This research uses a qualitative method by conducting interviews with speakers, observations, and study of official documents of the Catholic Church. Political theory, political participation, and strategy are used to analyze findings in research. After conducting research, several obstacles were found, namely the lack of understanding of the political community, feeling as a minority, and the political situation that was not conducive, due to the emergence of primordial groups that gave rise to sectarian politics. The Catholic Church has a strategy, which consists of internal and external strategies. Internal strategy, targeting people and priests aims to instill understanding and knowledge of Catholic views, attitudes, and values in politics and prepare people for political contestation. Meanwhile, an external strategy in the form of cooperation with the KPU, Bawaslu, social organizations, and political parties, one of the aims is to create a conducive political climate for all groups. The researchers found that there were inhibiting factors in the church hierarchy, at the parish level, when there were lay people who had personal political interests so that the church's strategy did not reach everyone, especially those who fought in elections. Also, strategies to prepare people to participate in contestation are considered too short, only when a political year.

Keywords: Political Participation, Strategy, Religion, Catholic Church, Archdiocese of Semarang

A. Latar Belakang

Agama melalui tokoh agama dan lembaga agama turut memiliki pengaruh dalam dunia politik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia, yang dirilis November 2018. Rilis survei tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan politik mencapai angka 51,7 persen. Agama Islam, sebagai agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia, telah banyak berpartisipasi dalam bidang politik di Indonesia, khususnya melalui berbagai ormas keagamaannya. Selain Agama Islam, agama lainnya memiliki pandangan sendiri. Ajaran Kristen Protestan misalnya memandang politik sebagai salah satu sarana untuk membawa kedamaian di dunia. Agama Budhha yang memandang politik merupakan suatu penggunaan kekuatan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas¹, Sementara itu, Agama Hindu dalam memandang politik menekankan pada tujuan politik itu sendiri, dimana harus ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam Agama Konghucu, Agama menjadi dasar moralitas bagi setiap nilai dan tindakan politik. Politik tanpa berlandaskan moralitas keagamaan, atau moralitas ketuhanan merupakan hal yang “ditabukan” menurut pandangan Konghucu².

Selain kelima agama diatas, Agama Katolik memiliki sederet dokumen yang membahas mengenai politik dan partisipasi politik. Dokumen *Gaudium et Spes* no.75 menyatakan, Gereja hendaknya bekerjasama dengan negara untuk mencapai tujuan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam politik pula, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik warganegara. Pimpinan Gereja tingkat lokal, di Keuskupan Agung Semarang, tampaknya cukup konsen dalam hal mendorong umatnya untuk terlibat lebih banyak dalam bidang politik. Hal ini tertuang dalam Arah Pastoral 2018, yang salah satu poin yang ditekankan ialah inklusif, yang berarti turut terlibat dalam usaha-usaha bersama membangun Gereja dan Bangsa. Keterlibatan untuk membangun bangsa salah satunya dilakukan melalui bidang politik. Dalam Arah

¹ Sri Dhammanada. *What Buddhist Believe*. Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society Malaysia. 2002. hlm 314.

² Budi S. Tanuwibowo, *Agama, Politik & Negara Menurut Perspektif Khonghucu*, <http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-menurut-perspektif-khonghucu.html>, diakses 7 Desember 2018

Pastoral tersebut, Uskup Mgr. Rubiyatmoko, sebagai pemimpin Keuskupan Agung Semarang, turut menekankan pentingnya peran umat Katolik dalam politik, salah satunya melalui *electoral activity*, yaitu Pilkada 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Sebagai Agama yang terorganisasi dari tingkat dunia hingga lingkungan, menjadi salah satu kemudahan bagi Gereja Katolik Indonesia untuk mendorong individu umat maupun organisasi masyarakat katolik untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, terdapat beberapa hambatan untuk mendorong partisipasi politik umat, Pastor Sugihartanta, sebagai ketua komisi PK4AS, yang menangani bidang sosial-politik-kemasyarakatan, menyampaikan bahwa kesadaran politik rendah dan perasaan sebagai minoritas, menjadi hambatan untuk mendorong umat mau ikut berpartisipasi dalam politik. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Strategi Gereja Katolik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang**” yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian-bagian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti hendak mengangkat satu rumusan masalah sebagai fokus dari penelitian ini, yaitu; Bagaimana strategi Gereja Katolik dalam upaya peningkatan partisipasi politik umatnya di Keuskupan Agung Semarang

C. Dasar Teori

1) Hubungan Agama dan Negara

A) Paradigma Integralistik

Paradigma ini memandang agama dan negara sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. di mana wilayah bahasan agama didalamnya juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan negara dan politik. Sementara itu, negara dipandang sebagai suatu lembaga politik sekaligus lembaga

keagamaan. Menurut Picostory dalam Wahyudi (2001:25), paradigma ini kemudian melahirkan yang disebut dengan negara agama.

B) Paradigma Simbiotik

Paradigma ini melihat antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling memerlukan dan memberikan dampak timbal balik. Dengan adanya negara, agama dapat berkembang di wilayah tertentu. Begitu pula dengan adanya agama, negara memiliki suatu panduan atau tuntunan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

C) Paradigma Sekularistik

Muncul anggapan dalam paradigma ini bahwa rasionalitas intelektual manusia mampu memunculkan tuntunan di berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, hingga politik tanpa memerlukan turunnya wahyu. Maka manusia mulai membangun berbagai bentuk ilmu berdasarkan humaniora, seperti hukum, pengetahuan alam, dan etika tanpa bantuan Tuhan maupun agama.³

2) Partisiapsi Politik

Miriam Budiarto yang mencoba mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung. Mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Huntington dan Nelson mencoba mengklasifikasi bentuk partisipasi politik kedalam beberapa katagori, antara lain :

³ Nasaruddin. *Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama*. Jurnal Hunafa. Vol 6. No 2. 2009. hlm 214-217

1. Electoral Activity,

Kegiatan yang mencakup pemberian suara, memberi sumbangan untuk kampanye, mengikuti kegiatan kampanye, bekerja untuk proses pemilihan, dan segala bentuk tindakan yang ditujukan mempengaruhi hasil dari pemilihan umum.

2. Lobbying

Kegiatan yang dilakukan perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat pemerintahan atau pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan-keputusan mereka yang menyangkut persoalan di masyarakat.

3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan tergabung dalam suatu organisasi, sebagai anggota maupun pemimpin dengan tujuan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Contacting

Tindakan perorangan yang dilakukan untuk menjalin koneksi dengan pejabat dalam rangka mendapatkan keuntungan dan manfaat hanya untuk dirinya sendiri atau hanya segelintir orang.

5. Violence

Kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian orang-orang lain, baik secara fisik maupun harta benda.⁴

Menurut Milbrath, ada beberapa faktor yang mendorong partisipasi politik Individu. Dikutip dari Maran (2007), setidaknya ada 5 faktor yang mendorong partisipasi politik, meliputi :

a) Kepekaan Individu

Kepekaan individu terhadap rangsangan politik sangat mendorong minat untuk berpartisipasi. Rangsangan disini dapat berupa diskusi politik, maupun pemberitaan dari media massa.

⁴ Damsar, *Pengantar Ilmu Sosilogi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 188-189

b) Karakteristik Pribadi

Faktor ini menyangkut tingkat kepedulian individu terhadap permasalahan disekitar. Permasalahan yang dimaksud menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi disekitarnya.

c) Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial yang dimaksud menyangkut suku, ras, etnis, dan juga agama. Dimana masing masing karakteristik ini memiliki nilai yang dijunjung dan nilai-nilai ini dapat mempengaruhi persepsi maupun tindakan yang diambil individu termasuk di dalam politik. Kecenderungan individu untuk memperjuangkan tegaknya nilai tersebut

d) Kondisi Politik

Kondisi politik yang kondusif, aman, dan terbuka akan menimbulkan rasa senang dan kinat untuk berpartisipasi didalamnya. Sementara sebaliknya, jika politik dipenuhi ancaman dan tindakan brutal.

e) Pendidikan Politik

Merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik individu, dengan tujuan individu paham dan mau terlibat dalam aktivitas politik.⁵

Menurut Milbrath (1965) dikutip dari D.Ruedin, berdasar tingkat partisipasinya, partisipasi politik dapat dikelompok ke dalam beberapa katagori meliputi: **Spektator**, mereka yang berpartisipasi pada tingkat dasar, seperti ikut dalam pemilihan dengan memberikan suaranya, atau menghadiri diskusi politik, **Transisional**, mereka yang mulai melakukan kegiatan politik secara aktif dan bersentuhan dengan partai seperti memberikan sumbangan, selain itu juga dapat berupa menghadiri orasi-orai politik, serta melakukan hubungan dan komunikasi dengan pejabat publik, dan **Gladiator**, mereka yang sangat aktif dalam kegiatan politik terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Berbagai kegiatan

⁵ Ade Aditia Armi. Ade Aditia Armi. *Studi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013*. Journal FISP Volume 1 no 2. 2014. hlm 6

tersebut, antara lain aktif sebagai anggota partai, pejabat publik, kandidat dalam pemilihan umum, maupun hanya sebagai tim kampanye⁶

3) Strategi

Secara umum, strategi dapat dikelompokkan dalam menurut pelaksanaannya di tiap tingkatan organisasi. Tingkatan tersebut meliputi, strategi korporasi, kedua strategi bisnis unit, dan strategi fungsional. Strategi korporasi dibuat oleh pimpinan di level puncak, yang menggambarkan tentang arah tujuan organisasi. Sementara itu, strategi bisnis unit adalah strategi yang dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah untuk menerjemahkan strategi yang telah dibuat Manajer level puncak, ke dalam tujuan-tujuan organisasi lebih konkret. Strategi fungsional, lebih mengarah pada pelaksanaan fungsional organisasi seperti keuangan, SDM, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya⁷.

Dalam menyusun suatu rancangan strategi, diperlukan cara berpikir yang strategis. Wahyudi (1996) dikutip dari Dr. Quadrat Nugraha, menyampaikan ada 5 tahapan dalam berpikir strategis;

1. Identifikasi Masalah

Proses awal sangat penting untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi. Sangat penting untuk melihat berbagai masalah-masalah strategis beserta gejala-gejala yang mengikutinya

2. Pengelompokan Masalah

Dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah, dimana masalah yang telah teridentifikasi dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi.

3. Proses abstraksi

Melihat masalah-masalah yang krusial sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebab atau pemicu masalah tersebut. Tahapan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan penyusunan metode pemecahannya.

⁶ D. Ruedin. *Testing Milbrath's 1965 Framework of Political Participation: Institution and Social Capital*. Contemporary Issues and Ideas in Social Science. 2007. hlm 9-10

⁷ Quadrat Nugraha, "Manajemen Strategis", Jakarta : Universitas Terbuka, 2014, hlm. 8

4. Penentuan Metode Pemecahan Masalah

Setelah diketahui faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul, maka disusun metode atau rencana memecahkan masalah tersebut.

5. Perencanaan implementasi

Dalam tahap ini strategi teknis dan konkret direncanakan sebagai implementasi pemecahan masalah yang ada.⁸ Beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh organisasi saat akan menyusun suatu strategi, antara lain : Mengidentifikasi lingkungan yang dihadapi dan menetapkan visi misi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal berkaitan dengan peluang, kekuatan ancaman, dan kelemahan, lalu menentukan ukuran keberhasilan strategi, menentukan tujuan dan target terukur, dan menentukan strategi paling sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang⁹

D. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Narasumber dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Fokus dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan Gereja Katolik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik di Keuskupan Agung Semarang. Lokus dari penelitian ini, adalah wilayah Keuskupan Agung Semarang di Jawa Tengah

E. Hasil dan Pembahasan

1) Gereja Katolik dan Politik

Gereja memandang politik sebagai suatu yang luhur dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama, yang disebut dengan *Bonum Commune* dan *Bonum Publicum*. Gereja Katolik memiliki berbagai dasar ajaran mengenai politik

⁸ Quadrat Nugraha, *Ibid*, hlm. 7

⁹ Zulfikar. Dkk, *Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*. Jurnal Administrasi Publik "KOLABORASI" Volume 1 Nomor 2. 2015. hlm 184.

itu sendiri, secara magisterium banyak dokumen Gereja seperti *Gaudium et Spes* dan Dekrit Kerasulan Awam. Sementara dasar teologis, banyak ayat alkitab yang menjadi dasar umat Katolik dalam politik, misalnya pada Kitab Matius bab 22 ayat 21, disana dituliskan, “*Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah"*”.

Dalam politik, Gereja Katolik mengambil peran kenabian, imamat, dan gembala. Peran kenabian menjelaskan politik dari segi teologis, peran imamat mendorong umat untuk terlibat dalam politik sebagai perwujudan iman, peran gembala untuk memberikan penerangan kepada umat mengenai kewajiban dalam hidup berbangsa. Kebanyakan umat, masih memandang politik sebatas yang dipraktikkan oleh para politisi, yang artinya banyak yang memandang negatif. Ada tiga kelompok umat, mereka yang jumlahnya banyak adalah yang tidak tertarik dan tidak peduli politik, lalu ada mereka yang buta tentang politik, dan yang jumlahnya sedikit mereka yang tertarik pada politik.

2) Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang

Umat Keuskupan Agung Semarang (KAS), beberapa telah berpartisipasi dengan menjadi kontestan dalam Pemilu. Selain itu, dalam Pemilu juga banyak umat Katolik yang terlibat menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu. Dalam Pemilu sendiri, KAS melakukan pendidikan pemilih, menggandeng berbagai ormas katolik, kepada umatnya agar menggunakan hak pilihnya secara tepat. Sementara itu, dalam *policy making*, Gereja dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan mengatasi radikalisme, narkoba, dan pergaulan bebas. Sementara itu ormas-ormas Katolik, hadir sebagai *pressure group* dan mengawal kebijakan pemerintah. Secara umum, partisipasi umat katolik dalam Pemilu sudah mengalami peningkatan, dilihat dari jumlah kontestan Katolik, jumlah umat yang menjadi penyelenggara dan pengawas, dan umat yang mulai sadar dan peduli dengan politik.

Hambatan-hambatan dihadapi oleh Gereja Katolik dalam meningkatkan partisipasi umatnya, antara lain: hambatan internal dimana umat yang kurang

tertarik dan paham mengenai politik, serta pastor Katolik masih sedikit yang konsen terhadap bidang politik. Hambatan eksternal, adalah munculnya kelompok primordial yang membawa politik sektarian, menjadikan iklim yang tidak kondusif. Selain itu juga perasaan sebagai minoritas, menekan umat Katolik, untuk mau terlibat. Dilihat dari hasil penelitian diatas, dapat dikelompokan bahwa tingkat partisipasi umat Katolik dapat masuk dalam hampir di semua tingkatan partisipasi menurut Milbrath, yaitu tingkat spektator dalam jumlah banyak yang partisipasinya hanya menggunakan hak pilihnya, tingkat transisional terdapat ormas-ormas katolik yang telah menjadi kelompok penekan, dan tingkat gladiator merupakan mereka yang terlibat dalam kontestasi.

Dilihat bentuk partisipasinya kembali lagi paling banyak adalah *elektoral activity* dan bentuk partisipasi lobbying dan kegiatan organisasi, yang mana dapat dilihat dari adanya ormas-ormas katolik. Dengan menjadi anggota ormas, maka umat Katolik telah melakukan bentuk partisipasi politik kegiatan organisasi, yang mana berkaitan dengan kegiatan lobbying, dimana kemudian ormas-ormas ini seringkali melakukan diskusi isu-isu aktual maupun kebijakan pemerintah, yang kemudian menyampaikan masukan-masukan kepada pemangku kepentingan. Faktor-faktor pendorong partisipasi politik belum banyak muncul, karena faktor iklim politik tidak kondusif dengan hadirnya kelompok sektarian, dan kurangnya faktor pendidikan politik. Disinilah Gereja perlu melakukan intervensi dengan strateginya.

3) Strategi Gereja Katolik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Secara umum dapat dibagi menjadi dua, strategi internal yang menyoal umat dan pastor, serta strategi eksternal bekerjasama dengan berbagai pihak mewujudkan iklim politik kondusif. Strategi yang menyoal umat, dilakukan dengan memberikan pemahaman melalui berbagai kegiatan seperti melalui tema-tema adven, pendidikan dan pembekalan, hingga penyisipan materi politik dalam khotbah. Ditegaskan, homili/khotbah tidak untuk ajang kampanye, namun sebagai mimbar sabda penyampaian nilai-nilai Katolik dalam politik. Sementara kepada pastor, dilakukan melalui kegiatan temu pastoral dan retreat atau rekoleksi pastor.

Ada pula pembekalan khusus, untuk mereka yang hendak terjun dalam kontestasi politik. Strategi dianggap berjalan baik, dimana peningkatan kontestan beragama Katolik di Jawa Tengah, dari Pemilu 2014 yang hanya 100 orang, pada Pemilu 2019 menjadi 355 orang. Namun, Gereja juga dinilai cukup terlambat mendidik umatnya dan hanya melakukan pendidikan jangka pendek saja, saat menyambut tahun politik. Hirarkie memiliki peluang menjadi hambatan berjalannya strategi, ketika ada oknum yang memiliki kepentingan politik pribadi. Bila dianalisis dengan teori pemikiran strategis, Gereja telah menerapkan pola pemikiran strategis dari identifikasi dan pengumpulan masalah, hingga abstraksi masalah tersebut, sampai pada akhirnya muncul dua kelompok strategi di atas. Ketika menggunakan perspektif organisasi Gereja Katolik yang memiliki sistem hirarki, kita dapat melihat strategi korporasi dibuat ditingkat pimpinan Keuskupan. Uskup sebagai pimpinan level puncak dalam Keuskupan menggambarkan arah tujuan Gereja Katolik melalui Arah Dasar yang dikeluarkannya. Selain melalui Arah Dasar Keuskupan, Uskup sebagai pimpinan level puncak juga seringkali mengeluarkan surat gembala maupun nota pastoral untuk memberi pesan kepada umat dan memperjelas tujuan organisasi pada kondisi atau event tertentu. Sementara itu, strategi pada tingkatan bisnis unit dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah, dalam hal ini adalah Komisi PK4AS. Komisi yang diketuai Pastor Sugi ini menerjemahkan arah dasar keuskupan dalam bentuk-bentuk konkret seperti pelatihan, kaderisasi, pendidikan politik, dan sosialisasi. Sementara itu, pada tingkat fungsional, terdapat di tingkat Paroki dimana Imam-imam Paroki sebagai pelaksana fungsional. Dalam konteks Gereja, maka Imam paroki bertugas pada fungsi-fungsi pengembangan dan perisapan sumber daya manusia, yang amana umat Katolik dengan memberikan pemahaman-pemahaman mendasar mengenai nilai-nilai Gereja Katolik dalam lingkup perpolitikan.

F. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Gereja memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi umatnya di Keuskupan Agung Semarang. Strategi itu terdiri dari strategi untuk internal Gereja dan strategi eksternal, yang

dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak lain. Dalam perjalannya, strategi telah menghasilkan dampak positif peningkatan jumlah kontestan Katolik di Jawa Tengah, pada Pemilu 2019. Namun, strategi yang dilaksanakan hanya dilakukan dalam jangka pendek saat menyambut tahun politik. Ditemukan juga, bahwa hirarkie juga dapat menjadi hambatan ketika ada oknum yang memiliki kepentingan politik pribadi, dan bertindak tidak profesional.

G. Saran

Pastor-pastor Katolik sebaiknya mulai berani menyatakan pendapat mengenai isu strategis dan politik dalam perspektif ajaran Katolik, diharapkan dapat menjadi contoh dan mendorong umat lebih peduli mengenai politik. Selain itu, pastor paroki hendaknya menjadi ujung tombak pendataan dan pelaksanaan strategi, sehingga tidak disusupi oleh kepentingan segelintir oknum awam. Sebaiknya, Gereja Katolik melaksanakan pembekalan dalam jangka panjang, sehingga calon kontestan dapat lebih matang secara pengetahuan maupun pendalaman nilai-nilai Katolik.

Referensi

- Armi., Ade Aditia. 2014 *Studi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013*. Journal FISP Volume 1 no 2.
- Budiarjo, Miriam 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Damsar. 2015. *Pengantar Ilmu Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dhammanada, Sri. 2002. *What Buddhist Believe*. Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society Malaysia.
- Nugraha, Quadrat.2014.*Manajemen Strategis*.Jakarta : Universitas Terbuka
- Nasaruddin. 2009. *Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama*. Jurnal Hunafa. Vol 6. No 2.
- Tanuwibowo, Budi S. 2012. *Agama, Politik & Negara Menurut Perspektif Khonghucu*, dimuat tanggal 15 September 2012
<http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-menurut-perspektif-khonghucu.html>, diakses 7 Desember 2018
- Zulfikar. Dkk, *Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*. Jurnal Administrasi Publik “KOLABORASI” Volume 1 Nomor 2. 2015. hlm 184